

PESAN KOMUNIKASI POLITIK PERSIS DALAM PEMILU TAHUN 2014

Nunung Nurhasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung

Email: nungnurhas@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud mengkaji pesan komunikasi politik Persis dalam Pemilu Tahun 2014. Pesan komunikasi politik Persis pada Pemilu tahun 2014 disampaikan kepada berbagai kalangan, yaitu kepada anggota Persis dan bagian-bagian otonomnya, kepada elite politik nasional, dan kepada masyarakat pada umumnya. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menitik beratkan kepada deskripsi dan penafsiran (interpretasi) yang mendalam atas berbagai peristiwa yang teramati melalui teknik-teknik pengumpulan data yang ditetapkan. Pesan komunikasi politik Persis dalam pemilu 2014 dibagi kepada dua macam sasaran, yaitu kalangan eksternal dan kalangan internal. Dilihat dari perspektif komunikasi politik, pesan komunikasi politik Persis dalam pemilu 2014 kepada anggota Persis berbentuk instruksi atau perintah langsung yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik dalam kegiatan-kegiatan dakwah maupun dalam rapat-rapat resmi organisasi. Pesan komunikasi politik Persis dalam pemilu 2014 terhadap para elite bangsa disampaikan dalam bentuk Maklumat dan himbauan-himbauan yang bersifat persuasif dan simbolik. Selain dalam bentuk Maklumat, Persis juga menerima kunjungan-kunjungan silaturahmi para elite politik ke Kantor Pusat Persis untuk membangun komunikasi politik secara langsung.

Kata Kunci : *Komunikasi Politik Persis, Pemilu 2014*

Pendahuluan

Kelahiran gerakan-gerakan tersebut merupakan salah satu ciri dari kebangkitan umat Islam setelah sebelumnya, yaitu pada abad ke 12 M sampai dengan 15 M mengalami kemunduran. Bahkan sampai abad ke 19 pun umat Islam masih banyak yang mengalami keterbelakangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun keagamaan. Sementara musuh-musuh Islam melakukan serangan fisik maupun pemikiran kepada umat Islam (Faisal Ismail, 2002: 159-161).

Munculnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam tersebut menunjukkan bahwa organisasi masyarakat Islam (Ormas Islam) merupakan bagian tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini karena Ormas Islam di Indonesia memainkan peran yang sangat penting, bukan hanyadalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan upaya membebaskan dan memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajahan (kolonialisme).

Ormas-ormas Islam di Indonesia, yang dalam konteks gerakan Islam di Indonesia dikategorikan gerakan Islam tradisional dan gerakan pembaharuan atau gerakan modern Islam direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama (Islam tradisional) dan Sarekat Islam, Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persatuan Islam (Islam modernis) pada saat itu. Mereka secara aktif merespons isu-isu dan pemikiran politik kontemporer yang sebagiannya berupa pemikiran-pemikiran politik yang tidak bersumber dari ajaran Islam tapi dari kebudayaan lain (Barat) seperti konsep nasionalisme, demokrasi dan komunisme.

Kelompok tradisional memelihara konsistensi mereka dalam memegang teguh ajaran Islam berdasarkan para imam mazhab, sedangkan kelompok modernis mengungjung jargon “ kembali kepada ajaran al-Qur’an dan hadis” (B.J.O Schrieke, 1975: 69). Pada fase selanjutnya, gerakan-gerakan politik Islam yang bersemangat reformis, radikal, dan fundamentalis, berada di jalur yang sama dengan gerakan modernis (Masykuri Abdullah, 1999: 11). Sebagaimana telah disebutkan di atas, di antara gerakan Islam modernis yang aktif terlibat dalam pergulatan politik Indonesia adalah Persis (Persatuan Islam), sebuah ormas Islam yang didirikan di Bandung pada tahun 1923. Organisasi ini telah melahirkan tokoh-tokoh Islam seperti Ahmad Hassan, Natsir, dan Isa Anshary. (Allan A. Samson, 1978: 214). Meskipun misi Persis sejak awal berdirinya dititikberatkan pada pembentukan pemahaman keagamaan melalui kegiatan pendidikan dan dakwah, akan tetapi di kemudian hari berkembang juga ke bidang-bidang dan kegiatan politik demi menguatkan tuntutan keyakinan mereka akan kesempurnaan ajaran Islam.

Menurut Syafiq A. Mughni (1979: 57-58), Islam yang ditawarkan Persis adalah Islam yang sistemik, yaitu Islam yang ajarannya merupakan kesatuan dari akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Aktualisasi Islam yang bercorak demikian menuntut

adanya aksi dalam berbagai bidang kehidupan termasuk politik. Ormas Persis, sebagai lembaga dakwah dan pendidikan yang menjadi institusi terbaik bagi anggota-anggotanya untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahyi munkar*, juga memberi ruang dan peluang kepada para anggotanya untuk menyalurkan aspirasi dan minat politiknya melalui organisasi politik yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tujuan ormas Persis. Untuk itu bahkan Persis juga mengeluarkan himbuan dan rekomendasi untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai yang dibidannya, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB).

Selain pembinaan terhadap anggota, Ormas Persis juga telah menyusun Manhaj Siyasah, sebuah pedoman bagi organisasi dan anggota-anggotanya dalam dunia politik, dan senantiasa melakukan konsolidasi dengan daerah pada setiap peristiwa politik seperti pada Pilpres, Pilleg, dan Pilkada. Dengan dibebaskannya anggota Persis menyalurkan aspirasi politiknya ke partai-partai yang memiliki visi misi yang sama dengan jam'iyah Persis, maka Persis memandang perlu melakukan pembinaan secara terus menerus demi menjaga keutuhan organisasi di tengah-tengah dinamika politik di negeri ini dan di internal jam'iyah (M. Abdurrahman, 2015: 8).

Uraian mengenai latar belakang masalah di atas, menggambarkan bagaimana respons Persis sebagai ormas Islam terhadap dinamika sosial politik di Indonesia dari masa ke masa sejak organisasi ini didirikan hampir seratus tahun yang lalu. Respons Persis atas perkembangan tersebut menjadi penting bagi Persis karena hal itu menyangkut kehidupan beragama umat Islam di Indonesia, khususnya para anggota dan simpatisan Persis. Apa yang telah dilakukan oleh para tokoh pendiri (*founding fathers*) Persis dalam memperjuangkan kepentingan politik umat Islam di Indonesia tampak dalam perjuangan para tokoh tersebut dalam pembentukan ideologi bangsa dan peranan mereka melalui partai politik.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menitik beratkan kepada deskripsi dan penafsiran (interpretasi) yang mendalam atas berbagai peristiwa yang teramati melalui teknik-teknik pengumpulan data yang ditetapkan. Posisi teori dalam pendekatan kualitatif menjadi acuan penting dalam upaya, ensistematisasi, menafsirkan dan

menganalisis temuan-temuan di lapangan, akan tetapi tidak menjadi patokan untuk menguji temuan di lapangan. Meskipun menggunakan istilah ‘deskriptif, metode deskriptif tidak sekedar mendeskripsikan temuan-temuan penelitian tanpa ada analisis ilmiah di dalamnya. Oleh karena itu, sebagian peneliti menggunakan istilah metode deskriptif analitik, sekedar untuk menjelaskan bahwa di dalamnya terjadi analisis atas temuan peneliti di lapangan. Dengan pengertian seperti di atas, maka penelitian dengan metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (Lexy J. Moleong, 2002: 2).

Dengan menggunakan metode ini, peneliti menggali informasi dari dokumen seperti profil organisasi, laporan tahunan, dokumen organisasi, bersama-sama dengan observasi langsung khususnya yang berkaitan dengan aktivitas politik dan menggabungkannya dengan data hasil wawancara dengan sejumlah informan. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan banyak perspektif tentang kiprah politik Persis dalam suatu proses politik di satu peristiwa di Indonesia, yaitu Pemilihan Umum tahun 2014 yang menyelenggarakan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil presiden pada tahun 2014.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu berbagai data tentang aktivitas organisasi Persis, berbagai aturan organisasi, tentang anggota, serta berbagai faktor yang berkaitan dengan dinamika sikap politik Persis dalam peristiwa Pemilu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para penggiat atau aktivis organisasi, mulai dari pengurus di tingkat pusat hingga tingkat cabang, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh organisasi, tulisan-tulisan dari tokoh Persis yang dimuat dalam terbitan-terbitan resmi Persis.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari organisasi atau lembaga-lembaga atau sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder berupa dokumen, jurnal, buku-buku dan hasil penelitian yang terkait dengan Politik Persis. Pengumpulan data sekunder telah dilakukan sejak sebelum pengumpulan data primer dari lapangan dilakukan dan terus berlanjut sesuai kebutuhan. Sedangkan pengumpulan data lapangan dilakukan sesuai dengan situasi yang terjadi guna memperkuat pemahaman serta informasi apa saja

yang mesti dikumpulkan. Persitiwa penting pada saat penelitian ini dilakukan adalah pada saat-saat dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakilnya, pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Muhajir sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Noeng Muhadjir, 1990: 120). Teknik wawancara ini dilakukan kepada beberapa informan yang meliputi: (a) Ketua Bidang jam'iyah PP Persis (b) Ketua Bidang Siyasah Jamiyah (c) Ulama Persis, (d) beberapa anggota, dan (e) anggota bagian otonom Persis. Selain kedua teknik di atas, peneliti juga melakukan observasi. Teknik ini digunakan dengan tujuan mendeskripsikan setting sosial yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Tahap pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap inventarisasi data; tahap ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagaimana telah diuraikan di atas.
2. Tahap Reduksi Data dan Kategorisasi Tema-tema

3. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

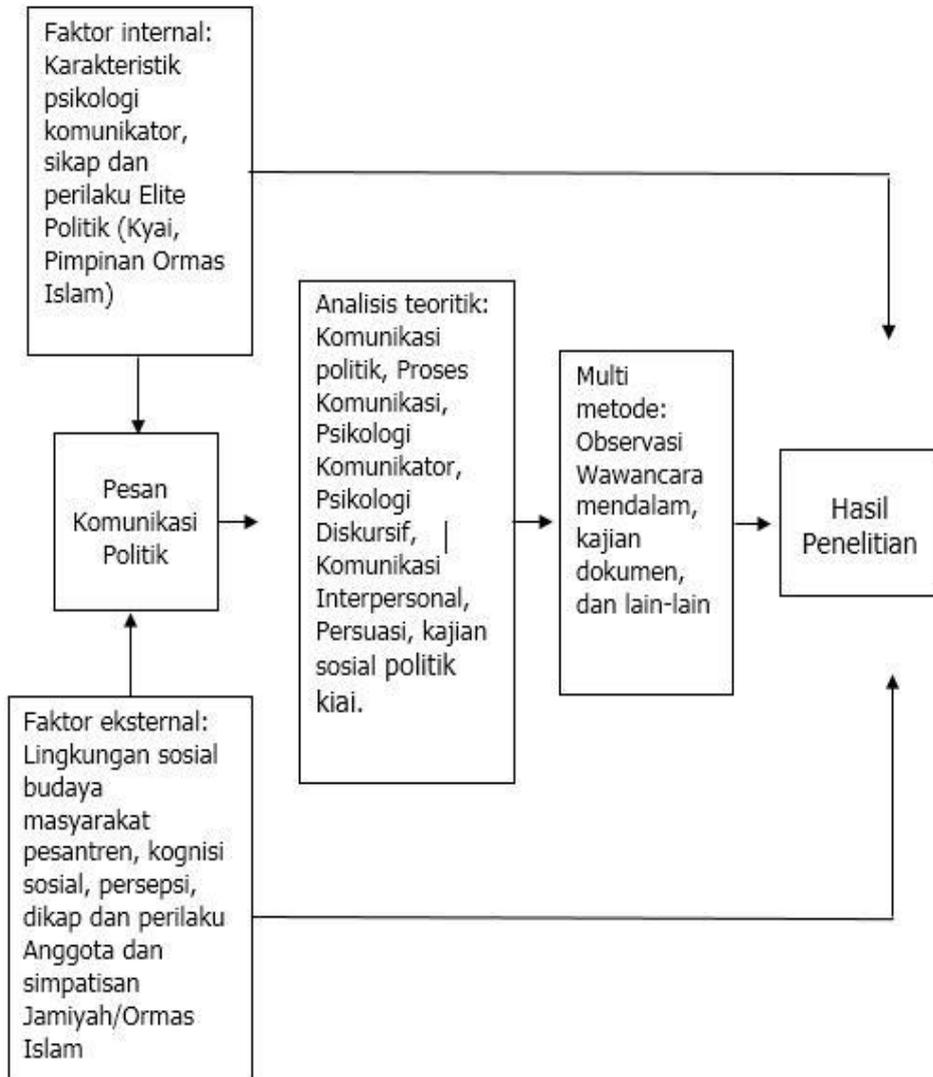
Analisis data menurut Patton dalam Muhajir, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Muhajir, 103). Kesimpulan-kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan (2) tinjauan ulang catatan lapangan (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

4. Kerangka Kerja Penelitian

Dalam penelitian ini, kegiatan difokuskan kepada penggalian informasi tentang pesan komunikasi politik Persis dalam Pemilu 2014.

Kerangka kerja di atas menggambarkan bagaimana pesan politik Persis tidak lepas dari aspek-aspek yang melingkupi organisasinya. Karakteristik kiyai, ulama, dan ustadz-ustadz Persis serta lingkungan sosial budaya masyarakat yang

tidak terlepas dari keberadaan Persis sebagai ormas. Faktor lainnya adalah lembaga pendidikan Persis yang turut mempengaruhi cara pandang anggota Persis terhadap dinamika politik di Indonesia.



Hasil dan Pembahasan

Analisis Pesan Komunikasi Politik Persis dalam Pemilu Tahun 2014

Pada setiap peristiwa politik, Persis senantiasa menyampaikan pesan-pesan politiknya yang terutama ditujukan kepada anggota Persis dan simpatisannya. Pesan-pesan politik (*political messages*) Persis tidak terlepas dari tujuan organisasi untuk dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Pesan politik Persis juga tidak terlepas dari kebijakan umum Siyashah

Jam'iyah Persis dan kebijakan-kebijakan lainnya di bidang siyasah yang dikeluarkan Persis sejak awal berdirinya organisasi ini hingga sekarang. Ada empat lapisan khalayak yang menjadi kelompok sasaran komunikasi politik Persis, yaitu: elite politik, anggota Persis, umat Islam, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pesan politik Persis terhadap semua lapisan masyarakat di atas didasarkan kepada dan berkaitan erat dengan cita-cita dan tujuan organisasi Persis, yaitu terlaksananya syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan berdasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Cita-cita inilah yang mendasari partisipasi aktif Persis dalam bidang politik dengan mengarahkan orientasi politik anggota-anggotanya yang terjun di bidang politik agar mereka tidak melepaskan dan melupakan idealisme, cita-cita, dan tujuan organisasi dalam aktivitas mereka di dunia politik. Idealisme tokoh-tokoh politik Persis pada masa lampau, seperti Mohammad Natsir, Isa Anshary, dan Latif Muchtar, yang dalam aktivitas politiknya tidak melepaskan diri dari idealisme dan cita-cita Persis, menjadi cermin dan teladan bagi para pelanjutnya di bidang politik.

1. Pemilu Legislatif

Kebijakan politik Persis pada menjelang Pemilu 2014 tercermin dalam beberapa surat yang diterbitkannya untuk para anggota maupun umat Islam. Salah satu surat yang dikeluarkan oleh PP Persis pada tahun 2013 menjelang Pemilu 2014 adalah Peraturan Pimpinan Pusat Persatuan Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 Nomor: 1077/JJ-C.1/PP/2013. Surat ini kemudian diedarkan kepada anggota Persis di cabang-cabang di seluruh Indonesia melalui Surat Edaran PP Persis dengan Nomor: 1078/JJ-C.3/PP/2013 tentang Pedoman Siyasah Jam'iyah Persis, Panduan Siyasah Jam'iyah dan Peraturan PP Persis tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) menghadapi Pemilu Legislatif 2014 yang menjelaskan tentang berbagai persoalan siyasah dalam kaitannya dengan Pemilu tahun 2014. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran jam'iyah Persis dan Bagian Otonom PP Persis. Adapun pengantar dari isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

Bidgar Siyasah di Bidang Jam'iyah PP Persatuan [Islam, *pen*] dalam menghadapi berbagai macam persoalan siyasah menerbitkan Pedoman Siyasah Jam'iyah Persis, Panduan Siyasah Jam'iyah dan Peraturan PP Persis tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Surat Edaran ini bagi seluruh jajaran jam'iyah PP,

PWK, PW, PD, PC, PR dan Bagian Otonom PP Persis agar diketahui dan ditaati Pada pokoknya, Surat Edaran ini mengedarkan Peraturan PP

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014

Analisis atas pesan komunikasi Persis dalam Pilpres tahun 2014 dapat dikenali dari ragam sasaran komunikasi (khalayak) yang ditujunya dan media komunikasi yang digunakannya. Sasaran komunikasi politik Persis pada Pilpres tahun 2014 ditujukan pada dasarnya kepada dua macam sasaran, yang masing-masing terdiri atas dua kelompok sasaran, yaitu:

- 1) Eksternal
 - a) Elite politik nasional
 - b) Masyarakat umum
- 2) Internal
 - a) Pengurus dan anggota Persis
 - b) Umat Islam

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014, Pimpinan Pusat Persis telah menerbitkan sebuah maklumat yang disampaikan kepada semua komponen bangsa, dari mulai elite-elite politik di tubuh pemerintahan, kepada umat Islam, dan kepada masyarakat pada umumnya. Pesan politik Persis yang disampaikan kepada kalangan elite politik, kepada pemerintah, lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan kepada masyarakat umum dalam bentuk maklumat tertulis. Isi maklumat tersebut berisi lima butir himbauan, yaitu:

a. Eksternal

- 1) Menghimbau kepada pemerintah Republik Indonesia dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden 2014 harus bersikap netral, jujur, adil, dan profesional.
- 2) Menekankan kepada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden RI beserta tim suksesnya agar bersaing secara ksatria dengan mengedepankan akhlak al-karimah baik dalam menyampaikan tataran program, visi dan misi saat kampanye, maupun pada perdebatan yang diselenggarakan KPU, sebagai sarana pendidikan politik demi tumbuhnya kematangan dan kedewasaan berpolitik.

- 3) Menghimbau kepada seluruh pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden harus siap menang dan siap kalah dan bersikap legowo atas kekalahannya dan tidak takabur terhadap kemenangannya.
- 4) Menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia agar menolak segala bentuk kampanye hitam dan praktik politik uang yang dapat mencederai penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI.
- 5) Mengingatkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindak tegas dan menerapkan sanksi tanpa ada keraguan bagi para pelaku kecurangan sesuai dengan perundang-undangan

Dilihat dari perspektif komunikasi politik, lima butir pesan komunikasi politik Persis terhadap kalangan elite politik, pemerintah, dan masyarakat umum berbentuk himbuan dan peringatan tertulis seperti ini termasuk kepada kategori himbuan yang bersifat persuasif dan sama sekali tidak menekankan terhadap akibat dari himbuan tersebut jika tidak dilaksanakan. Dalam kategori dari David J. Bell (Mukarom, 2016: 95) jenis komunikasi politik seperti ini termasuk kepada kategori pembicaraan pengaruh dalam bentuk nasihat, dorongan, permintaan.

Isi pesan komunikasi politik Persis kepada elite politik dirumuskan dalam bentuk pesan-pesan retoris yang mencakup aspek-aspek normatif. Isi Maklumat menekankan aspek “*al-akhlak al-karimah*”, yaitu dengan perilaku dan penampilan yang baik dalam menyampaikan tataran program, visi, dan misi mereka pada saat melaksanakan kampanye, maupun pada peristiwa-peristiwa perdebatan yang diselenggarakan KPU.

Pesan komunikasi politik yang disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia menekankan kepada penolakan segala bentuk kampanye hitam dan praktik politik uang (*money politics*). Kampanye hitam (*black campaign*) kini marak terjadi terutama melalui media sosial. Informasi-informasi dalam media sosial cukup sulit untuk disaring dan dilacak sumbernya. Tidak mudah pula membedakan mana berita yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan mana berita yang palsu atau *hoax*. Lebih jauh, lagi pelacakan atas sumber-sumber berita dari media sosial bukan merupakan pekerjaan enteng.

Kampanye dalam bentuk “bagi-bagi uang” atau *money politics* disinyalir banyak terjadi pada Pilpres 2014. Bahkan sebagian rakyat sudah tidak segan dan ragu lagi untuk terlibat dalam praktek politik uang yang dianggapnya semata-mata sebagai pemberian. Tindakan seperti ini tentu saja telah mencederai proses demokrasi yang sedang terjadi dan diperjuangkan oleh seluruh komponen bangsa. Dalam hal ini Persis hanya dapat “menghimbau” agar rakyat tidak terlibat dalam politik bagi-bagi uang tersebut. Namun Persis sebagai ormas tentu saja tidak dapat lebih jauh mengawasi dan melakukan tindakan hukum atas praktek politik uang yang terjadi di masyarakat, sehingga efektivitas pesan ini juga tidak mudah untuk diukur.

Selain kepada dua kelompok di atas, Persis juga menyampaikan maklumat tersebut kepada kalangan internal anggota dan pengurus Persis. Isi maklumat (pesan) tersebut adalah:

b. Internal

- 1) Kepada seluruh anggota Persatuan Islam (Persis) wajib menjaga dan memelihara keutuhan jam'iyah dengan cara menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik manapun yang mengusung pasangan calon Presiden dan wakil Presiden.
- 2) Kepada seluruh anggota Persatuan Islam (Persis), simpatisan dan seluruh komponen bangsa yang mempunyai hak pilih agar aktif dan berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden 2014 .
- 3) Kepada seluruh anggota Persatuan Islam diimbau untuk dapat memilih secara cerdas dengan mempertimbangkan rasionalitas berlandaskan kepada kriteria pemimpin berdasarkan al Qur'an dan as Sunnah, karena memilih suatu pilihan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT.
- 4) Mengajak seluruh anggota Persatuan Islam, simpatisan, dan seluruh komponen bangsa untuk berani menolak politik transaksional yang dapat melahirkan pemimpin yang tidak berdaulat penuh dan akan menjadi pemimpin boneka yang dapat menyengsarakan seluruh komponen bangsa.
- 5) Kepada seluruh anggota Persatuan Islam hendaknya merapatkan shaf dalam bingkai imamah dan imarah agar terpilih seorang pemimpin yang lebih maslahat bagi jam'iyah khususnya dan bagi seluruh komponen bangsa umumnya.

- 6) Kepada seluruh anggota Persatuan Islam, simpatisan dan seluruh komponen bangsa agar berdoa kepada Allah SWT, supaya Negara Indonesia diberikan Pemimpin harapan ummat, yang merupakan sosok negarawan yang taat beribadah, satu kata dalam perbuatan, menjunjung nilai kemanusiaan yang beradab, tegas memberantas korupsi, penegakan hukum dan penyelamatan aset negara, memiliki karakter yang kuat dalam mementingkan bangsa diatas kepentingan diri, parpol, dan kroni, memiliki strategi perubahan, dan berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam sebagai negara yang penduduk muslim terbesar.

Berbeda dengan pesan politik yang disampaikan kepada khalayak di luar keanggotaan Persis, pesan politik Persis kepada pengurus organisasi dan anggota-anggota Persis lebih tegas dan bersifat instruktif. Dari isi maklumat di atas diketahui bahwa Persis merupakan ormas yang cukup terbuka dan aktif dalam membangun komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Kepentingan untuk menjaga keutuhan organisasi menjadi faktor utama dalam komunikasi politik Persis. Kebijakan untuk menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik dimaksudkan untuk menunjukkan sikap bebas, aktif, netral, dan terbuka Persis dan menempatkan organisasi di atas kepentingan partai politik. Hal itu juga dimaksudkan agar Persis tidak terjebak pada politik praktis dukung mendukung pasangan calon yang satu dan melawan pasangan calon yang lain.

Namun demikian Persis tetap menginstruksikan anggotanya agar menjadibagian yang aktif dan berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan bahwa Persis sebagai ormas Islam menjadi bagian dari komponen masyarakat yang ikut serta dalam menyukseskan Pemilu dengan pesan-pesan politik yang memperlihatkan komitmen Persis sebagai organisasi dakwah yang mengutamakan kepentingan dakwah. Dalam hal ini secara tegas Persis menginstruksikan anggotanya untuk tetap memegang teguh al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menghindari politik transasional yang mengedepankan kepentingan sesaat.

Pesan politik Persis kepada umat Islam secara keseluruhannya bersifat himbuan dan persuasif. Partisipasi umat Islam dalam Pemilu dan harapan harapan umat agar memiliki pemimpin yang taat,menjunjung nilai kemanusiaan yang

beradab, tegas memberantas korupsi, penegakan hukum dan penyelamatan asset negara, memiliki karakter yang kuat dalam mementingkan bangsa diatas kepentingan diri, parpol, dan kroni, memiliki strategi perubahan, dan berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam sebagai negara yang penduduk muslim terbesar. Pesan ini menjadi bagian penting bagi Persis dalam menyampaikan pesan politik kepada umat Islam secara keseluruhannya. Bentuk kedua dalam komunikasi politik antara Persis dengan elite politik adalah dalam bentuk menerima kunjungan langsung kalangan elite politik ke markas Pimpinan Pusat Persis. Sejumlah kunjungan dilakukan oleh para elite politik pendukung calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014. Namun demikian, kunjungan hanya dilakukan oleh calon Presiden Hatta Radjasa dan para pendukung-pendukung dari pasangan calon tersebut (Prabowo Subiyanto dan Hatta Radjasa). Hal ini dapat dimengerti karena dalam pemilu anggota legislatif Persis juga cenderung mengarahkan suara anggota dan simpatisannya kepada partai-partai dan calon anggota legislatif yang menjadi pendukung pasangan. Prabowo Subiyanto dan Hatta Radjasa. Dapat diduga bahwa informasi mengenai posisi Persis dalam Pilpres sudah diketahui dan dipahami sehingga mungkin kunjungan dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla tidak dilakukan ke kantor Persis, meski pada Pemilu sebelumnya (2009) Yusuf Kalla merupakan calon Presiden pilihan Persis.

Komunikasi politik dalam bentuk kunjungan langsung atau *blusukan* (*impromptu visit*) merupakan bentuk komunikasi konvensional yang berlangsung sejak lama, terutama pada masa teknologi informasi belum maju seperti sekarang ini. Bahkan hingga sekarang, *blusukan* tetap merupakan bentuk komunikasi politik yang paling efektif, terutama apabila dilakukan secara langsung oleh kandidat pemimpin. Pada bentuk komunikasi seperti ini kandidat bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan calon pemilih (konstituen). Secara psikologis, bentuk komunikasi seperti ini amat efektif karena terjadi hubungan emosional yang mendalam, misalnya menggambarkan kepedulian, kebersamaan, dan dukungan terhadap keprihatinan dan keluhan-keluhan rakyat yang disampaikan kepadanya.

Pesan komunikasi politik Persis terhadap kandidat presiden dan wakil presiden yang disampaikan melalui tim suksesnya juga bersifat persuasif dalam bentuk himbauan-himbauan. Penekanan terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, pesan-pesan politik jika telah menjadi pemimpin terpilih, dan nasihat-nasihat

untuk menjadi pemimpin yang baik, adalah tema-tema yang umum disampaikan oleh pimpinan Persis kepada tim sukses dan kandidat yang datang berkunjung. Di sana tidak ada kontrak-kontrak politik yang disepakati. Dalam hal ini Persis tampaknya menghindari pola komunikasi politik kontraktual dan transaksional yang bisa membawa Persis kepada pola komunikasi politik praktis.

Kesimpulan

Kebijakan politik Persis dalam Pemilu 2014 senantiasa mengacu kepada tujuan ormas Persis (jamiyyah) yang menegaskan pentingnya pelaksanaan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan ini menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Persis dalam aspek politik, termasuk dalam Pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, segala kebijakan politik Persis pada pemilu 2014 juga berintikan pesan-pesan dakwah di ranah politik. Hal ini menjelaskan bahwa agama dan politik bagi Persis merupakan dua wilayah yang tidak dapat dipisahkan. Politik bagi Persis merupakan bagian dari dakwah dan diarahkan bagi kepentingan-kepentingan dakwah.

Pesan komunikasi politik Persis dalam pemilu 2014 dibagi kepada dua macam sasaran, yaitu kalangan eksternal dan kalangan internal. Kalangan eksternal yang dimaksud adalah masyarakat umum yang bukan anggota Persis dan lembaga-lembaga non-Persis, baik dari kalangan lembaga-lembaga atau instansi pemerintahan, ormas-ormas Islam, dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan kalangan internal yang dimaksud adalah anggota Persis yang mempunyai kartu anggota dan nomor anggota serta anggota-anggota Bagian Otonom Persis, yaitu Persistri, Pemuda Persis, Pemudi Persis, Hima Persis, dan Himi Persis. Pesan komunikasi kepada ke dua kelompok tersebut berbeda dalam hal sifat dan penekanan (*stressing*)-nya.

Dilihat dari perspektif komunikasi politik, pesan komunikasi politik Persis dalam pemilu 2014 kepada anggota Persis berbentuk instruksi atau perintah langsung yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik dalam kegiatan-kegiatan dakwah maupun dalam rapat-rapat resmi organisasi. Secara resmi Persis telah menyampaikan pesan politiknya melalui penerbitan Pedoman Siyasah Jam'iyyah Persis, Panduan Siyasah Jam'iyyah dan Peraturan PP Persis tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) menghadapi Pemilu Legislatif 2014. Di dalam pedoman, panduan, dan peraturan tersebut PP Persis menekankan tentang pentingnya ajaran Islam sebagai landasan politik

Persis dan pegangan bagi anggota dalam partisipasi politik mereka dalam Pemilu tahun 2014.

Pesan komunikasi politik Persis dalam pemilu 2014 terhadap para elite bangsa disampaikan dalam bentuk Maklumat dan himbauan-himbauan yang bersifat persuasif dan simbolik. Selain dalam bentuk Maklumat, Persis juga menerima kunjungan-kunjungan silaturahmi para elite politik ke Kantor Pusat Persis untuk membangun komunikasi politik secara langsung. Komunikasi dalam bentuk kunjungan langsung elite politik ke PP Persis tersebut (*blusukan*) juga terjadi dalam pola komunikasi formal, persuasif, dan simbolik. Dalam hal ini Persis tetap membatasi jarak komunikasi pada wilayah-wilayah normatif yang senantiasa dikaitkan dengan pesan-pesan ajaran Islam. Pesan komunikasi politik Persis dalam pemilu 2014 terhadap masyarakat Muslim di Indonesia bersifat himbauan secara normatif dengan menjadikan ajaran Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis mengenai tuntutan dan tuntunan berpolitik dalam Islam. Dalam hal ini Persis mengingatkan kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang tidak boleh diabaikan.

Persis juga menekankan perlunya umat Islam berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemilu dan memilih pemimpin terbaik dari yang ada, karena pemilu, baik dalam rangka memilih pemimpin maupun memilih anggota legislatif, merupakan bagian dari ajaran Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam.

BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman, Muhammad. 2000. *S Hikam Islam Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Faisal Ismail. 2002. *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*. Yogyakarta: LESPI.
- MasykuriAbdillah.*Demokrasi di PersimpanganMakna: ResponsIntelektual Muslim Indonesia TerhadapKonsepDemokrasi*. Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya, 1999.
- Noeng Muhadjir, *MetodologiPenelitainKualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, edisi III, cet. ke-VII.
- Schrieke, B.J.O. 1975. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*.Jakarta: Bhatara.
- Syafiq, A.Mughni. 1979. *Hassan andung Pemikir Islam Radikal*. Surabaya: PT. Binailmu.
- Samson, Allan A. 1978.*Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contenporary Indonesia* dalam Karel D. Jakson dan Lucian W. Pay (eds) *Political Power and Communacation in Indonesia*,Berkeley, Los Angles: university of California.